



## **Studi Kasus Merger Sekolah Dasar Negeri : Solusi Mikro Efisiensi Anggaran Pendidikan Dan Krisis Guru**

**Asep Rahmat Hidayat<sup>1\*</sup>, Ahmad Subagyo<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Magister Teknologi Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia  
Email: <sup>1\*</sup>[aaseprh1979@gmail.com](mailto:aaseprh1979@gmail.com)  
(\* : coresponding author)

**Abstrak** – Laporan penelitian ini menyajikan analisis mengenai kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh Presiden Republik Indonesia dan dampaknya terhadap ketersediaan guru di sekolah dasar negeri. Dengan menggunakan metode kualitatif naratif, studi ini menyoroti bagaimana merger sekolah (regrouping) dapat berfungsi sebagai strategi mikro yang efektif untuk mengatasi krisis kekurangan guru dan sekaligus mencapai efisiensi anggaran di tingkat daerah. Pembahasan difokuskan pada berbagai aspek efisiensi yang dihasilkan dari merger, termasuk perampingan administrasi, pengurangan biaya operasional, optimalisasi redistribusi guru, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pemanfaatan fasilitas. Laporan ini juga mengidentifikasi dampak dan tantangan implementasi kebijakan merger, diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang komprehensif.

**Kata Kunci:** Efisiensi Anggaran, Ketersediaan Guru, Merger Sekolah (*Regrouping*), Manajemen Pendidikan, Kebijakan Pendidikan

**Abstract** – This research report presents an analysis of the budget efficiency policy implemented by the President of the Republic of Indonesia and its impact on teacher availability in public elementary schools. Using qualitative narrative methods, the study highlights how school mergers (regrouping) can serve as an effective micro-strategy to address the teacher shortage crisis while simultaneously achieving budget efficiency at the local level. The discussion focuses on various aspects of efficiency resulting from mergers, including streamlining administration, reducing operational costs, optimizing teacher redistribution, and improving the quality of education and utilization of facilities. The report also identifies the impacts and challenges of implementing the merger policy, concluding with comprehensive conclusions and policy recommendations.

**Keywords:** Budget Efficiency, Teacher Availability, School Merger (*Regrouping*), Education Management, Education Policy

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang: Kebijakan Efisiensi Anggaran Pendidikan Presiden RI dan Tantangan Kekurangan Guru SD**

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen konstitusional untuk mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan, sebuah kewajiban yang telah dilaksanakan sejak tahun 2009.<sup>1</sup> Dalam konteks dinamika fiskal dan kebutuhan pembangunan yang beragam, kebijakan efisiensi anggaran telah menjadi fokus strategis. Presiden Prabowo, misalnya, menekankan pentingnya setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan dampak maksimal. Hal ini diwujudkan melalui pemangkasan belanja Alat Tulis Kantor (ATK) hingga 90% seiring dengan transisi ke sistem digital, serta pengurangan perjalanan dinas pejabat dan akademisi. Anggaran yang dihemat dialokasikan kembali untuk kebutuhan yang lebih esensial, seperti peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, serta program makan bergizi gratis.<sup>2</sup>

Di sisi lain, sektor pendidikan dasar di Indonesia menghadapi tantangan serius berupa krisis kekurangan guru yang kronis. Data menunjukkan bahwa Indonesia masih membutuhkan tambahan sekitar 300.000 hingga 679.000 tenaga pengajar, dengan kekurangan yang paling terasa di wilayah pelosok dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).<sup>3</sup> Ketergantungan pada guru honorer untuk menutupi kekurangan ini sangat tinggi, dengan 704.503 guru honorer dan 141.724 Guru Tidak Tetap (GTT) pada tahun 2022.<sup>3</sup> Namun, kesejahteraan mereka seringkali jauh dari memadai, dengan disparitas gaji yang mencolok antara daerah perkotaan seperti DKI Jakarta (Rp 31 juta per bulan) dan daerah lain (Rp 300 ribu per tiga bulan).<sup>5</sup> Kondisi ini menempatkan guru honorer pada posisi rentan terhadap kebijakan pemangkasan anggaran, yang dapat berujung pada pemecatan massal.<sup>6</sup>



Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, meskipun didasari oleh niat baik untuk optimalisasi alokasi dana, dapat menciptakan sebuah dilema. Di satu sisi, ada upaya untuk menghemat pengeluaran makro melalui pemangkasan biaya operasional rutin dan mendorong digitalisasi. Namun, di sisi lain, potensi dampak negatif yang diungkapkan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) seperti penurunan kualitas pendidikan, peningkatan angka putus sekolah, kesulitan akses di daerah, dan pemecatan guru honorer<sup>6</sup> menunjukkan bahwa efisiensi ini belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan mikro yang mendesak, terutama terkait ketersediaan dan kesejahteraan guru. Hal ini mengindikasikan bahwa fokus pada digitalisasi dan pengurangan biaya operasional, meskipun merupakan langkah maju, dapat memperburuk masalah kekurangan guru jika tidak diimbangi dengan investasi yang memadai pada sumber daya manusia inti pendidikan. Kebijakan ini perlu memastikan bahwa alokasi anggaran yang "dihemat" benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan esensial pendidikan tanpa mengorbankan kualitas atau memperparah krisis yang ada.

### **1.2. Krisis Kekurangan Guru di Indonesia: Data dan Implikasi**

Krisis kekurangan guru di Indonesia merupakan masalah struktural yang kompleks. Meskipun terdapat 3,31 juta guru secara nasional pada tahun ajaran 2022/2023, kebutuhan riil masih belum terpenuhi. Angka kekurangan guru bervariasi antara 300.000 hingga 679.000, tergantung pada sumber data.<sup>3</sup> Disparitas dalam data mengenai jumlah kekurangan guru ini menunjukkan adanya tantangan dalam konsistensi data dan metodologi perhitungan kebutuhan guru nasional. Ketidakseragaman ini dapat menghambat perumusan kebijakan yang tepat sasaran dan solusi yang efektif.

Kekurangan guru ini paling parah terjadi di daerah-daerah terpencil dan tertinggal, yang seringkali sangat bergantung pada guru honorer atau bahkan tidak memiliki guru tetap sama sekali.<sup>3</sup> Ketergantungan yang tinggi pada guru honorer, yang jumlahnya mencapai lebih dari 700.000 orang, menimbulkan kerentanan sistemik. Kesejahteraan guru honorer yang umumnya rendah dan ketimpangan gaji yang ekstrem<sup>5</sup> menciptakan beban ekonomi yang berat bagi mereka. Kondisi ini membuat mereka sangat rentan terhadap pemecatan massal akibat pemotongan anggaran, seperti yang pernah terjadi pada tahun 2024.<sup>6</sup>

Implikasi dari krisis kekurangan guru ini sangat luas terhadap kualitas pendidikan. Kelas yang kelebihan siswa, beban mengajar yang berlebihan bagi guru yang ada, dan kurangnya guru dengan spesialisasi tertentu dapat secara signifikan menghambat proses belajar mengajar yang efektif. Selain itu, masalah pemerataan guru melalui mutasi juga sulit dilaksanakan karena adanya isu kesejahteraan dan potensi kecemburuan sosial antar guru.<sup>5</sup> Situasi ini menunjukkan bahwa masalah bukan hanya terletak pada kuantitas guru, tetapi juga pada kualitas data untuk perumusan kebijakan dan kerentanan sosio-ekonomi tenaga pendidik yang ada. Kebijakan efisiensi yang tidak mempertimbangkan aspek-aspek ini berisiko memperparah ketimpangan dan memicu krisis sosial, bukan hanya pendidikan, karena potensi pemecatan massal dapat mengancam stabilitas sistem pendidikan secara keseluruhan.

### **1.3. Kebijakan Efisiensi Anggaran Pendidikan: Analisis Kebijakan Presiden dan Dampaknya**

Kebijakan efisiensi anggaran pendidikan di Indonesia saat ini berlandaskan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.<sup>6</sup> Kebijakan ini mencakup langkah-langkah konkret seperti pengurangan belanja ATK hingga 90% karena transisi ke sistem digital, serta pemangkasan perjalanan dinas pejabat dan akademisi. Dana yang dihemat dari pos-pos ini diarahkan untuk kebutuhan yang lebih esensial, termasuk kesejahteraan guru dan dosen, serta prioritas dana riset untuk penelitian yang lebih aplikatif dan berdampak nyata bagi industri dan masyarakat.<sup>2</sup> Pemerintah meyakini bahwa efisiensi ini akan mendorong transformasi pendidikan menuju sistem yang lebih adaptif dan berbasis teknologi, mempercepat digitalisasi pembelajaran, memperkuat kolaborasi dengan industri, dan meningkatkan transparansi alokasi anggaran, dengan tujuan akhir memaksimalkan dampak setiap rupiah yang dikeluarkan.<sup>2</sup>



Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya tanpa kritik. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyuarakan keprihatinan serius terhadap dampak potensial dari pemangkasan anggaran ini. Mereka mengidentifikasi lima dampak utama yang dapat merugikan: (1) penurunan kualitas pendidikan akibat terbatasnya anggaran untuk guru dan fasilitas; (2) peningkatan angka putus sekolah, terutama bagi siswa miskin yang bergantung pada bantuan pemerintah; (3) kesulitan akses pendidikan di daerah terpencil karena lambatnya pengadaan sekolah; (4) potensi pemecatan guru honorer secara massal, mengingat kerentanan status mereka; dan (5) meningkatnya ketimpangan pendidikan antara siswa dari keluarga kaya dan miskin.<sup>6</sup>

Terdapat diskrepansi yang signifikan antara narasi pemerintah mengenai tujuan dan dampak positif efisiensi anggaran dengan kekhawatiran serius dari pemangku kepentingan pendidikan seperti JPPI. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi, meskipun berlandaskan niat baik dan visi transformasi, mungkin belum sepenuhnya mempertimbangkan kerentanan sistem pendidikan di lapangan, terutama di tingkat dasar dan daerah terpencil, serta kesejahteraan tenaga pendidik non-PNS. Perbedaan pandangan ini mengisyaratkan bahwa dampak kebijakan tidaklah tunggal, melainkan kompleks dan multifaset, dengan potensi konsekuensi yang tidak terduga pada berbagai lapisan ekosistem pendidikan. Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan tujuan efisiensi makro dengan kebutuhan mendesak di tingkat mikro, serta memitigasi dampak negatif yang mungkin timbul.

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang diberlakukan oleh Presiden Republik Indonesia, khususnya dampaknya terhadap ketersediaan guru di sekolah dasar negeri. Lebih lanjut, penelitian ini akan mengeksplorasi secara naratif studi kasus merger sekolah dasar sebagai solusi mikro yang potensial untuk mengatasi kekurangan guru dan meningkatkan efisiensi anggaran di tingkat daerah, dengan fokus pada aspek administrasi, biaya operasional, redistribusi guru, serta manfaat komprehensif lainnya.

## 2. METODE

### 2.1. Pendekatan Kualitatif Naratif dan Desain Studi Kasus

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif naratif untuk memahami pengalaman, persepsi, dan dampak kebijakan efisiensi anggaran serta implementasi merger sekolah dari sudut pandang berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan penggalian cerita dan konteks di balik data kuantitatif, memberikan wawasan yang lebih kaya tentang "bagaimana" dan "mengapa" fenomena ini terjadi.<sup>8</sup> Hal ini sangat relevan untuk menangkap nuansa dampak kebijakan pada guru, siswa, dan komunitas sekolah, yang seringkali tidak terwakili oleh data statistik semata.

Desain studi kasus dipilih untuk memberikan analisis mendalam tentang fenomena merger sekolah dasar dalam konteks efisiensi anggaran dan kekurangan guru di Indonesia. Studi kasus memungkinkan eksplorasi intensif terhadap satu atau beberapa kasus merger sekolah yang relevan, memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi, tantangan, dan manfaat yang diperoleh.<sup>8</sup> Fokus pada studi kasus merger SD di berbagai daerah seperti Cirebon<sup>9</sup>, Ngawi<sup>8</sup>, Bojonegoro<sup>10</sup>, Kerinci<sup>8</sup>, Salatiga<sup>8</sup>, Mijen<sup>11</sup>, dan Kota Bekasi<sup>12</sup> akan memberikan basis empiris yang kuat dan memungkinkan identifikasi pola serta variasi dalam implementasi.

### 2.2. Sumber Data dan Teknik Analisis

Data penelitian ini bersumber dari berbagai dokumen dan laporan yang tersedia secara publik. Ini mencakup artikel berita dari media terkemuka, jurnal akademik yang relevan, laporan kebijakan pemerintah yang diterbitkan, serta proposal penggabungan sekolah yang dapat diakses. Data yang dikumpulkan mencakup narasi tentang kebijakan efisiensi anggaran, statistik mengenai kekurangan guru, berbagai studi kasus merger sekolah, serta analisis dampak efisiensi pada berbagai aspek operasional dan kualitas pendidikan.



Data akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dan naratif. Informasi dari berbagai sumber akan dikodifikasi dan dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan pertanyaan penelitian, seperti efisiensi administrasi, biaya perjalanan dinas, penanganan kekurangan guru, manfaat lain dari merger, dampak keseluruhan, dan tantangan implementasi. Penekanan akan diberikan pada identifikasi pola yang muncul, hubungan sebab-akibat yang tersembunyi, dan kontradiksi antar narasi yang berbeda. Triangulasi informasi dari berbagai perspektif, misalnya antara pandangan pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO), akan digunakan untuk meningkatkan validitas dan kedalaman temuan, memastikan bahwa laporan ini menyajikan gambaran yang seimbang dan komprehensif.

### **3. ANALISA DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Efisiensi Administrasi yang Lebih Ramping**

Merger sekolah dasar secara inheren merampingkan struktur administrasi dengan mengonsolidasikan beberapa entitas sekolah menjadi satu. Proses ini secara langsung mengurangi duplikasi peran manajerial dan staf pendukung, seperti kepala sekolah, bendahara, dan staf tata usaha. Dengan satu manajemen terpusat, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, pelaporan keuangan lebih terkoordinasi, dan pengelolaan operasional menjadi jauh lebih efisien. Pengelolaan dana, termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), juga menjadi lebih efisien karena jumlah rekening bank yang dikelola berkurang, yang pada gilirannya meminimalkan potensi kesalahan dan meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran.

Proposal penggabungan SD Negeri Sukamaju 1 dan 2 menjadi SD Negeri Sukamaju, misalnya, secara eksplisit mencantumkan tujuan efisiensi pembiayaan dan pengelolaan pendidikan yang lebih baik sebagai salah satu alasan utama.<sup>13</sup> Penggabungan sekolah dasar (regrouping) secara umum dipandang sebagai upaya strategis untuk mengoptimalkan sarana prasarana pendidikan dan menyempurnakan kelembagaan demi pengelolaan SD yang lebih efektif dan efisien.<sup>14</sup> Hal ini secara otomatis memerlukan penataan kembali kegiatan administrasi pendidikan yang sebelumnya terfragmentasi. Setelah merger, pengelolaan dana BOS menjadi lebih baik karena adanya satu pimpinan dan satu rekening, yang sebelumnya mungkin dipecah di antara dua atau lebih sekolah.<sup>10</sup>

Kebijakan efisiensi anggaran Presiden yang memangkas belanja ATK hingga 90% karena administrasi beralih ke sistem digital<sup>2</sup> sangat selaras dengan manfaat merger. Sekolah hasil merger, sebagai entitas yang lebih besar, memiliki kapasitas dan insentif yang lebih besar untuk mengadopsi dan mengimplementasikan sistem manajemen keuangan sekolah berbasis aplikasi. Aplikasi semacam AdminSekolah, misalnya, diklaim dapat menghemat waktu hingga 70% dibandingkan metode manual, meminimalkan risiko kesalahan, dan meningkatkan transparansi.<sup>15</sup> Ini menunjukkan bahwa efisiensi administrasi pasca-merger bukan hanya sekadar pengurangan jumlah personel atau rekening, melainkan juga katalisator untuk transformasi digital dalam pengelolaan sekolah. Konsolidasi memungkinkan investasi yang lebih terpusat pada sistem digital yang canggih, yang pada gilirannya akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan, sebuah isu yang sering menjadi perhatian dalam pengelolaan dana pendidikan yang tidak efisien.<sup>11</sup> Keterkaitan ini menciptakan sinergi antara kebijakan efisiensi makro pemerintah dan implementasi mikro di tingkat sekolah.

Berikut adalah perbandingan konseptual struktur administrasi dan pengelolaan dana pra- dan pasca-merger:

**Tabel 1.** Perbandingan Struktur Administrasi dan Pengelolaan Dana Pra- dan Pasca-Merger (Konseptual)

Aspek Administrasi	Kondisi Pra-Merger (2 Sekolah Kecil)	Kondisi Pasca-Merger (1 Sekolah Hasil Merger)	Potensi Efisiensi
Jumlah Kepala Sekolah	2	1	Pengurangan biaya gaji/tunjangan kepala sekolah

### 3.2. Pengurangan Biaya Perjalanan Dinas Kepala Sekolah

Salah satu dampak langsung dan paling nyata dari merger sekolah adalah konsolidasi kepemimpinan. Ketika dua atau lebih sekolah yang berdekatan digabungkan menjadi satu entitas, kebutuhan akan beberapa kepala sekolah di lokasi yang sebelumnya terpisah menjadi tidak relevan. Hal ini secara otomatis mengurangi jumlah individu yang harus melakukan perjalanan dinas untuk menghadiri rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota, mengikuti pelatihan, atau melaksanakan kegiatan resmi lainnya. Dengan demikian, biaya perjalanan dinas, yang mencakup akomodasi, transportasi, dan uang harian, dapat ditekan secara signifikan.

Kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo secara eksplisit telah memangkas "perjalanan dinas pejabat dan akademisi" dengan tujuan mengalokasikan anggaran tersebut ke kebutuhan yang lebih esensial.<sup>2</sup> Meskipun materi penelitian yang tersedia tidak menyediakan data kuantitatif spesifik mengenai pengurangan biaya perjalanan dinas kepala sekolah pasca-merger, prinsip kebijakan ini sangat mendukung efisiensi yang dihasilkan dari merger. Dokumen proposal merger SDN Sukamaju 1 dan 2 juga menyatakan tujuan efisiensi pembiayaan secara umum.<sup>13</sup> Secara logis, pengurangan satu posisi kepala sekolah berarti pengurangan satu set biaya perjalanan dinas yang sebelumnya ditanggung oleh dua entitas terpisah.

Keterbatasan data kuantitatif spesifik tentang penghematan biaya perjalanan dinas kepala sekolah pasca-merger dalam materi penelitian ini sebenarnya menunjukkan adanya celah dalam pelaporan dampak finansial yang lebih granular dari kebijakan merger. Namun, pengurangan ini merupakan konsekuensi langsung dan tak terhindarkan dari konsolidasi kepemimpinan. Hal ini memperkuat gagasan bahwa intervensi mikro seperti merger sekolah dapat secara efektif berkontribusi pada pencapaian tujuan kebijakan efisiensi makro pemerintah, bahkan tanpa adanya data terperinci yang dipublikasikan secara eksplisit.

### 3.3. Penanganan Kekurangan Guru Melalui Redistribusi

Merger sekolah menawarkan solusi strategis untuk mengatasi masalah kekurangan guru dan distribusi guru yang tidak merata, yang merupakan krisis pendidikan di Indonesia.<sup>3</sup> Ketika sekolah-sekolah yang berdekatan digabungkan, guru-guru dari sekolah yang ditutup atau digabungkan dapat dialokasikan kembali ke sekolah hasil merger yang baru atau didistribusikan ke sekolah lain di wilayah yang masih mengalami kekurangan guru. Mekanisme ini mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada, mengurangi kelebihan guru di satu tempat dan mengisi kekosongan di tempat lain, sehingga berpotensi menciptakan rasio guru-murid yang lebih ideal.

Regrouping atau penggabungan sekolah secara eksplisit disebut sebagai upaya untuk menyatukan dua atau lebih sekolah di bawah satu manajemen sebagai solusi untuk kekurangan guru dan siswa.<sup>8</sup> Sebagai contoh, Dinas Pendidikan Kota Kerinci, Jambi, pada tahun 2020 menggabungkan 15 sekolah dasar karena alasan kekurangan guru dan siswa.<sup>8</sup> Demikian pula, di Kota Bekasi, rencana merger 50 SD Negeri yang ditargetkan rampung Agustus 2025 bertujuan untuk efisiensi operasional, termasuk distribusi guru yang lebih efisien, terutama untuk guru spesialis

seperti guru agama, olahraga, atau tata usaha yang mungkin berlebihan di sekolah-sekolah kecil yang terpisah.<sup>12</sup>

Selain efisiensi kuantitatif, merger juga dapat membawa dampak kualitatif yang positif terhadap tenaga pendidik. Studi kasus di SDN Mijen menunjukkan bahwa setelah regrouping, kondisi guru menjadi lebih baik dan lebih bersemangat karena jumlah guru yang lebih banyak dan lengkap. Hal ini mendorong kolaborasi yang lebih intensif, memungkinkan guru untuk saling bertukar pikiran dan ide. Guru senior dapat berbagi pengalaman dengan guru junior, sementara guru muda dapat berbagi pengetahuan tentang teknologi.<sup>11</sup> Perubahan ini mengubah suasana persaingan yang mungkin ada sebelumnya menjadi kerja sama dan gotong royong, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas hasil belajar siswa dan mutu sekolah secara keseluruhan.<sup>11</sup>

Namun, implementasi redistribusi guru pasca-merger tidak selalu mulus dan menghadapi beberapa tantangan. Beberapa guru mengeluhkan potensi penumpukan guru yang dapat berakibat pada masalah tunjangan sertifikasi, dan status guru honorer seringkali terancam akibat kebijakan penggabungan.<sup>16</sup> Selain itu, ada kekhawatiran mengenai kesulitan penyesuaian diri guru terhadap lingkungan dan budaya sekolah yang baru.<sup>16</sup> Kondisi surplus guru juga dapat terjadi jika rekrutmen guru sebelumnya didasarkan pada pendekatan humanis atau kekeluargaan daripada berbasis kompetensi.<sup>17</sup> Pemerintah pusat sendiri juga tengah mendorong redistribusi guru ASN ke sekolah swasta sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan, menunjukkan bahwa masalah distribusi guru adalah isu nasional yang lebih luas.<sup>18</sup>

Keterkaitan ini menunjukkan bahwa merger sekolah memang dapat menyediakan kumpulan guru yang dapat dire distribusikan, sehingga mengatasi kekurangan guru secara kuantitatif. Namun, keberhasilan sesungguhnya dari solusi ini sangat bergantung pada bagaimana aspek kualitatif dan sosio-ekonomi ditangani. Penting untuk memastikan bahwa redistribusi dilakukan secara adil, tidak merugikan kesejahteraan guru (terutama guru honorer dan tunjangan sertifikasi), dan secara aktif mempromosikan adaptasi serta kolaborasi antar guru. Keberhasilan penanganan kekurangan guru melalui merger tidak hanya bergantung pada "perpindahan" fisik guru, tetapi pada manajemen sumber daya manusia yang komprehensif yang mendukung pengembangan profesional dan kesejahteraan mereka.

Berikut adalah tabel konseptual potensi optimalisasi sumber daya guru pasca-merger:

**Tabel 2.** Potensi Optimalisasi Sumber Daya Guru Pasca-Merger (Konseptual)

Aspek Guru	Kondisi Pra-Merger (Contoh: 2 Sekolah Kecil)	Kondisi Pasca-Merger (Contoh: 1 Sekolah Hasil Merger)	Potensi Optimalisasi/Dampak
Jumlah Guru Total	Terfragmentasi (misal: 5 di masing-masing)	Terkonsolidasi (misal: 10 di satu sekolah)	Penempatan guru lebih strategis, pengisian kekosongan
Rasio Guru-Murid	Sering tidak ideal (terlalu banyak/sedikit murid per guru di sekolah terpisah)	Lebih ideal dan seimbang	Peningkatan kualitas pengajaran, perhatian individual lebih baik
Distribusi Guru Spesialis	Terbatas atau berlebih di sekolah tertentu	Lebih seimbang dan efisien	Pemanfaatan keahlian guru secara maksimal
Tingkat Kolaborasi Antar-Guru	Terbatas karena jarak/persaingan	Meningkat, terbentuk komunitas belajar profesional	Lingkungan kerja yang lebih supportif, inovasi pedagogis
Kesejahteraan Guru Honorer	Rentan, gaji minim, status tidak jelas	Potensi peningkatan status/kesejahteraan (jika ada kebijakan pendukung)	Peningkatan motivasi dan retensi guru



### **3.4. Efisiensi dan Manfaat Komprehensif Lainnya**

Selain efisiensi administrasi, pengurangan biaya perjalanan dinas, dan penanganan kekurangan guru, merger sekolah dasar juga membawa sejumlah manfaat komprehensif lainnya yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Peningkatan Pemanfaatan Fasilitas dan Aset:

Merger sekolah memungkinkan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Bangunan sekolah yang sebelumnya mungkin kurang dimanfaatkan atau kelebihan kapasitas dapat dikonsolidasikan, sehingga sumber daya dapat difokuskan pada satu fasilitas yang lebih besar dan lengkap. Bangunan sekolah yang ditinggalkan setelah merger juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain yang mendukung pendidikan atau masyarakat, seperti pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) atau kelas jauh SMP.<sup>8</sup> Regrouping secara umum memiliki dampak positif pada efisiensi biaya operasional dan pemanfaatan aset, termasuk pengelolaan infrastruktur yang lebih baik karena peningkatan dana BOS.<sup>8</sup> Sekolah hasil regrouping juga berpotensi mengajukan permohonan renovasi bangunan karena telah memenuhi persyaratan jumlah siswa minimum (minimal 60 siswa) yang diperlukan untuk pengajuan renovasi.<sup>8</sup> Di Kota Bekasi, Dinas Pendidikan optimistis bahwa setelah merger 50 SD Negeri, pemanfaatan fasilitas sekolah seperti ruang kelas dan halaman akan lebih maksimal.<sup>12</sup> Penelitian juga menunjukkan bahwa pemanfaatan gedung SD yang digabung umumnya dimanfaatkan secara maksimal.<sup>19</sup> Optimalisasi fasilitas pasca-merger bukan hanya tentang penghematan biaya perawatan gedung yang tidak terpakai, tetapi juga tentang peningkatan akses terhadap fasilitas yang lebih baik dan memenuhi standar. Dengan mencapai kuota siswa minimum, sekolah hasil merger dapat membuka pintu bagi alokasi dana BOS yang lebih besar dan kesempatan untuk mengajukan renovasi, yang sebelumnya sulit diakses oleh sekolah-sekolah kecil yang kekurangan siswa. Ini menciptakan siklus positif antara efisiensi dan peningkatan kualitas infrastruktur.

Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Pengembangan Kurikulum:

Konsolidasi sekolah melalui merger dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memfasilitasi pengembangan kurikulum yang lebih komprehensif. Dengan jumlah guru yang lebih lengkap dan beragam spesialisasi di satu lokasi, kolaborasi antar guru menjadi lebih intensif. Hal ini memungkinkan mereka untuk berbagi praktik terbaik, mengembangkan strategi pengajaran yang inovatif, dan merancang kurikulum yang lebih relevan.<sup>8</sup> Kolaborasi antar guru sangat penting dalam menerapkan kurikulum terpadu dan memberikan manfaat besar bagi siswa.<sup>20</sup> Kolaborasi pendidikan secara umum dapat menggabungkan sumber daya dan kompetensi, meningkatkan relevansi pendidikan, dan membuka pintu bagi peningkatan fasilitas serta metode pengajaran yang inovatif.<sup>22</sup> Pengembangan kurikulum bersama antara lembaga pendidikan dan industri dapat memastikan kurikulum mencerminkan kebutuhan dunia kerja, mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan.<sup>22</sup> Dampak positif dari penggabungan sekolah juga terlihat pada peningkatan kinerja sekolah, kinerja guru, motivasi belajar siswa, dan prestasi sekolah.<sup>11</sup> Lingkungan yang lebih besar pasca-merger juga dapat mendukung implementasi kurikulum baru seperti Kurikulum Merdeka, yang memberikan fleksibilitas dan kreativitas kepada guru dalam mengembangkan pembelajaran.<sup>28</sup> Manfaat merger pada kualitas pembelajaran melampaui sekadar efisiensi operasional; ia menciptakan ekosistem yang lebih kaya untuk pengembangan profesional guru dan inovasi pedagogis. Dengan lebih banyak guru di satu lokasi, terbentuklah komunitas belajar profesional yang secara alami mendorong kolaborasi, berbagi keahlian, dan adaptasi kurikulum. Ini adalah investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia pendidikan yang sulit dicapai di sekolah-sekolah kecil yang terisolasi.

Peningkatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS):

Dana BOS dialokasikan berdasarkan jumlah peserta didik di setiap sekolah.<sup>29</sup> Sekolah dasar dengan jumlah siswa yang kurang dari standar minimum (misalnya, di bawah 60 siswa) berisiko tidak menerima dana BOS yang memadai atau bahkan tidak dibayar sama sekali.<sup>13</sup> Dengan merger, jumlah siswa dari beberapa sekolah digabungkan, sehingga sekolah hasil merger akan memiliki jumlah siswa yang lebih besar, memenuhi atau melampaui ambang batas minimum, dan dengan demikian menerima alokasi dana BOS yang lebih besar dan stabil.<sup>8</sup> Peningkatan dana ini dapat



digunakan untuk berbagai keperluan operasional dan peningkatan fasilitas. Analisis menunjukkan bahwa regrouping memiliki dampak positif terhadap efisiensi biaya operasional, termasuk penghentian penyaluran Dana BOS ke sekolah yang ditutup dan pengalihan anggaran ke sekolah hasil merger, yang meningkatkan penerimaan dana BOS.<sup>8</sup> Proposal merger SDN Sukamaju 1 dan 2 secara spesifik menyebutkan bahwa penggabungan dilakukan karena kekhawatiran siswa di bawah 100 orang akan berdampak pada pembayaran Dana BOS.<sup>13</sup> Peningkatan dana BOS pasca-merger adalah manfaat finansial yang substansial, mengubah sekolah-sekolah kecil yang mungkin terancam kekurangan dana menjadi entitas yang lebih stabil secara finansial. Ini bukan hanya tentang "efisiensi" dalam arti penghematan, tetapi juga tentang "efektivitas" dalam mengamankan sumber daya yang memadai untuk operasional dan peningkatan kualitas, yang sebelumnya terhambat oleh jumlah siswa yang sedikit.

Penghapusan Persaingan Tidak Sehat Antar Sekolah:

Di daerah dengan beberapa sekolah dasar yang berdekatan dan jumlah siswa yang terbatas, sering kali terjadi persaingan tidak sehat untuk mendapatkan siswa. Persaingan ini dapat mengarah pada praktik-praktik yang tidak produktif dan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Merger sekolah menghilangkan persaingan ini, menyatukan upaya dan sumber daya untuk fokus pada peningkatan kualitas pendidikan secara kolektif. Proposal penggabungan SD Negeri Sukamaju 1 dan 2 secara eksplisit mencantumkan "Menghilangkan persaingan yang kurang sehat" sebagai salah satu manfaat.<sup>13</sup> Studi kasus di SDN Mijen juga menunjukkan bahwa "persaingan yang panas" antar guru dari sekolah yang berbeda sebelum regrouping berubah menjadi "suasana yang saling bekerjasama dan gotong royong" setelah merger. Perubahan ini pada akhirnya meningkatkan kualitas hasil belajar siswa dan mutu sekolah.<sup>11</sup> Manfaat ini bersifat sosiologis dan organisasional, melampaui perhitungan finansial semata. Penghapusan persaingan tidak sehat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kohesif dan kolaboratif di antara para pendidik. Hal ini mendorong budaya berbagi pengetahuan dan praktik terbaik, yang secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan, karena energi yang sebelumnya dihabiskan untuk bersaing kini dialihkan untuk berkolaborasi demi tujuan bersama.

Berikut adalah ringkasan manfaat komprehensif merger sekolah:

**Tabel 3. Manfaat Komprehensif Merger Sekolah (Ringkasan)**

<b>Kategori Manfaat</b>	<b>Deskripsi Singkat</b>	<b>Snippet Pendukung</b>
Peningkatan Pemanfaatan Fasilitas & Aset	Optimalisasi penggunaan gedung dan fasilitas yang ada, potensi pemanfaatan ulang bangunan yang ditinggalkan, kualifikasi untuk renovasi	The Causes and Impact of Public Elementary School Regrouping, accessed June 13, 2025, <a href="https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISD/article/download/57063/27536/214365">https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISD/article/download/57063/27536/214365</a>
Peningkatan Kualitas Pembelajaran & Pengembangan Kurikulum	Peningkatan kolaborasi guru, inovasi pedagogis, pengembangan kurikulum yang lebih relevan, peningkatan prestasi siswa	The Causes and Impact of Public Elementary School Regrouping, accessed June 13, 2025, <a href="https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISD/article/download/57063/27536/214365">https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISD/article/download/57063/27536/214365</a>
Peningkatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Alokasi dana yang lebih besar dan stabil karena konsolidasi jumlah siswa, memenuhi ambang batas minimum pendanaan	The Causes and Impact of Public Elementary School Regrouping, accessed June 13, 2025, <a href="https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISD/article/download/57063/27536/214365">https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISD/article/download/57063/27536/214365</a>
Penghapusan Persaingan	Menyatukan upaya dan sumber daya, mendorong kolaborasi daripada	DAMPAK REGROUPING SEKOLAH TERHADAP



Tidak Sehat Antar Sekolah	kompetisi, menciptakan lingkungan kerja yang lebih kohesif	KINERJA GURU SDN MIJEN, JAGALAN, JEBRES, SURAKARTA Oleh: ANIK SULISTYONINGSIH A510140196 PROG, accessed June 13, 2025, <a href="https://eprints.ums.ac.id/64360/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf">https://eprints.ums.ac.id/64360/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf</a>
---------------------------	--	--

### 3.5 Dampak dan Tantangan Implementasi Merger Sekolah

#### a. Dampak Positif (Rekapitulasi)

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan merger sekolah dasar menunjukkan potensi besar dalam mencapai efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pendidikan. Dampak positif yang telah diidentifikasi meliputi:

- **Efisiensi Administrasi:** Perampingan struktur manajemen, konsolidasi rekening, dan potensi adopsi teknologi digital yang lebih baik, menghasilkan pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel.
- **Pengurangan Biaya Operasional:** Penurunan biaya perjalanan dinas kepala sekolah dan potensi penghematan pada pengadaan barang/jasa karena skala ekonomi.
- **Optimalisasi Sumber Daya Guru:** Redistribusi guru untuk mengatasi kekurangan dan penumpukan, serta peningkatan kolaborasi antar guru yang mendorong inovasi pedagogis.
- **Peningkatan Pemanfaatan Aset:** Optimalisasi penggunaan gedung dan fasilitas yang ada, serta potensi pemanfaatan ulang bangunan yang ditinggalkan untuk kepentingan pendidikan atau masyarakat.
- **Peningkatan Dana BOS:** Alokasi dana yang lebih besar dan stabil karena konsolidasi jumlah siswa, memungkinkan investasi lebih lanjut dalam kualitas pendidikan.
- **Peningkatan Kualitas Pembelajaran:** Lingkungan yang lebih kondusif untuk inovasi kurikulum dan strategi pengajaran, didukung oleh komunitas guru yang kolaboratif.
- **Penghapusan Persaingan Tidak Sehat:** Transformasi dari kompetisi menjadi kolaborasi antar sekolah, mengarahkan energi kolektif pada peningkatan mutu.

#### b. Tantangan Implementasi

Meskipun menjanjikan banyak manfaat, implementasi merger sekolah bukanlah tanpa hambatan. Proses ini melibatkan perubahan signifikan yang dapat memicu resistensi dari berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat. Tantangan-tantangan ini perlu diidentifikasi dan dikelola dengan cermat untuk memastikan keberhasilan kebijakan dan mencegah dampak negatif yang tidak diinginkan.

Salah satu tantangan finansial yang sering muncul adalah potensi kenaikan gaji. Ketika dua distrik sekolah bergabung, skala gaji seringkali "diratakan ke atas" (leveled up), mengadopsi skala gaji dari distrik yang lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan biaya personel meningkat dan bahkan meniadakan penghematan administrasi awal.<sup>30</sup>

Secara administratif, penggabungan dua atau lebih distrik sekolah adalah proses multi-tahap yang rumit. Ini membutuhkan beberapa kali pemungutan suara lokal di setiap komunitas yang berpartisipasi, dan mendapatkan persetujuan dari semua komunitas bisa menjadi tantangan besar.<sup>30</sup>

Aspek logistik dan sosial juga menimbulkan hambatan signifikan. Merger dapat menciptakan distrik yang mencakup area geografis yang lebih luas, mengakibatkan waktu perjalanan bus yang lebih lama bagi sebagian siswa. Kekhawatiran orang tua tentang hal ini dapat menjadi penghalang utama, bahkan menyebabkan usulan merger dibatalkan.<sup>30</sup> Emosi dan kenyamanan orang tua juga



menjadi tantangan yang perlu dipertimbangkan.<sup>12</sup> Selain itu, hambatan dalam skala kecil sering muncul dari orang tua atau wali murid yang belum sepenuhnya memahami maksud dan tujuan kebijakan regrouping.<sup>10</sup>

Dari sisi sumber daya manusia, guru mungkin merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan budaya sekolah yang baru.<sup>16</sup> Kekhawatiran tentang "penumpukan guru" dan dampaknya pada tunjangan sertifikasi juga sering muncul, serta ancaman terhadap status guru honorer.<sup>16</sup> Beberapa sekolah hasil merger bahkan dapat mengalami surplus guru jika rekrutmen sebelumnya tidak berbasis kompetensi.<sup>17</sup> Munculnya kesenjangan honor/gaji antar pendidik setelah merger karena sistem klasifikasi honor yang berbeda juga dapat menimbulkan masalah dan ketidakpuasan.<sup>17</sup>

Tantangan implementasi merger sekolah bersifat multidimensional, mencakup aspek finansial (potensi kenaikan gaji), logistik (jarak tempuh siswa), sosial (penerimaan masyarakat, penyesuaian guru), dan modal manusia (kesejahteraan dan status guru). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan merger tidak hanya bergantung pada perhitungan efisiensi di atas kertas, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk melakukan manajemen perubahan yang efektif, komunikasi yang transparan, dan kebijakan yang adil bagi semua pemangku kepentingan, terutama guru dan orang tua. Mengabaikan tantangan-tantangan ini berisiko mengubah potensi solusi menjadi serangkaian masalah baru yang menghambat kemajuan pendidikan.

#### **4. KESIMPULAN**

Merger sekolah dasar merupakan strategi mikro yang memiliki potensi signifikan untuk mendukung kebijakan efisiensi anggaran pendidikan Presiden Republik Indonesia sekaligus mengatasi krisis kekurangan guru di tingkat daerah. Analisis menunjukkan bahwa merger dapat secara efektif merampingkan administrasi, mengurangi biaya perjalanan dinas, dan mengoptimalkan distribusi guru, sehingga mengatasi masalah kekurangan dan penumpukan tenaga pengajar. Lebih jauh, kebijakan ini berpotensi meningkatkan pemanfaatan fasilitas dan aset sekolah, mengamankan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang lebih besar dan stabil, serta mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dan kolaborasi antar guru.

Namun, keberhasilan implementasi merger sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengelola tantangan kompleks yang muncul. Tantangan-tantangan ini meliputi potensi kenaikan biaya gaji personel pasca-merger, proses administratif yang rumit dan memakan waktu, kekhawatiran orang tua terkait jarak tempuh siswa, serta isu penyesuaian, penumpukan, dan kesejahteraan guru, khususnya bagi guru honorer. Dengan perencanaan yang matang, komunikasi yang transparan, dan kebijakan yang adil bagi semua pihak yang terdampak, merger sekolah dapat menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mewujudkan sistem pendidikan dasar yang lebih efisien dan berkualitas di Indonesia.

#### **Saran dan Rekomendasi Kebijakan**

Untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan kebijakan merger sekolah dalam konteks efisiensi anggaran dan penanganan krisis guru, beberapa rekomendasi kebijakan perlu dipertimbangkan baik di tingkat pusat maupun daerah:

##### **Untuk Pemerintah Pusat:**

- **Pengembangan Pedoman Merger yang Komprehensif dan Adaptif:** Pemerintah pusat perlu menyusun pedoman nasional yang jelas, terperinci, namun fleksibel untuk pelaksanaan merger sekolah. Pedoman ini harus mencakup model keuangan yang memperhitungkan potensi "salary leveling up" dan biaya transisi yang mungkin timbul, serta panduan yang kuat untuk manajemen perubahan sosial dan sumber daya manusia. Penting untuk memastikan pedoman ini dapat diadaptasi dengan konteks lokal dan karakteristik unik setiap daerah, mengingat keragaman kondisi pendidikan di Indonesia.
- **Kerangka Redistribusi Guru Nasional yang Kuat:** Membangun sistem redistribusi guru ASN yang transparan, adil, dan berbasis data adalah krusial. Sistem ini harus memastikan



penempatan guru yang berlebih dari sekolah yang dimerger ke daerah yang benar-benar membutuhkan, terutama di wilayah 3T, dengan jaminan kesejahteraan dan pengembangan profesional yang setara. Selain itu, perlu ada mekanisme yang jelas dan adil untuk penanganan guru honorer pasca-merger, termasuk prioritas pengangkatan sebagai ASN atau pemberian kompensasi yang layak, untuk menghindari dampak sosial yang merugikan.

- **Investasi dalam Infrastruktur Digital Pendidikan:** Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan dan implementasi sistem informasi manajemen sekolah yang terintegrasi dan berbasis digital secara nasional. Ini akan memaksimalkan efisiensi administrasi yang dihasilkan dari merger, mendukung transparansi pengelolaan dana, dan meminimalkan beban administratif manual di tingkat sekolah.
- **Evaluasi Dampak Berkelanjutan:** Melakukan studi dampak pasca-implementasi merger secara berkala dan menyeluruh, tidak hanya pada aspek finansial tetapi juga pada kualitas pembelajaran, kepuasan guru dan siswa, serta penerimaan masyarakat. Hasil evaluasi ini harus menjadi dasar untuk penyempurnaan kebijakan di masa mendatang, memastikan bahwa kebijakan terus relevan dan efektif.

**Untuk Pemerintah Daerah:**

- **Keterlibatan Komunitas dan Komunikasi Transparan:** Pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi dan dialog intensif dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua, guru, komite sekolah, dan masyarakat lokal, sejak tahap perencanaan merger. Mengidentifikasi dan mengatasi kekhawatiran mereka secara proaktif, misalnya terkait jarak tempuh siswa atau identitas sekolah, akan membangun kepercayaan dan mengurangi resistensi.
- **Perencanaan Sumber Daya Manusia yang Detail:** Menyusun rencana penempatan guru pasca-merger yang mempertimbangkan spesialisasi, beban kerja, dan kesejahteraan guru secara individual. Memberikan dukungan psikologis dan pelatihan adaptasi bagi guru yang terdampak perubahan sangat penting untuk menjaga moral dan kinerja. Pemerintah daerah juga harus berkomitmen untuk tidak melakukan PHK massal guru honorer tanpa solusi yang adil dan berkelanjutan.
- **Pemanfaatan Aset Bangunan yang Ditinggalkan:** Mengidentifikasi dan merencanakan pemanfaatan optimal bangunan sekolah yang ditinggalkan pasca-merger untuk kepentingan pendidikan atau masyarakat, seperti pusat belajar komunitas, perpustakaan daerah, atau fasilitas pelatihan keterampilan. Hal ini akan menambah nilai bagi komunitas dan mencegah pemborosan aset.
- **Penguatan Manajemen Keuangan Sekolah:** Mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan di sekolah hasil merger, memanfaatkan peningkatan dana BOS untuk peningkatan fasilitas dan program pembelajaran yang berkualitas. Pelaporan efisiensi yang dicapai secara berkala juga akan meningkatkan akuntabilitas kepada publik dan pemangku kepentingan.

Rekomendasi ini secara eksplisit mengatasi kontradiksi dan tantangan yang diidentifikasi dalam analisis, menunjukkan bahwa solusi mikro seperti merger sekolah memerlukan dukungan kebijakan makro yang terkoordinasi dan implementasi yang humanis. Penekanan pada komunikasi, manajemen perubahan, dan kesejahteraan guru mencerminkan pemahaman bahwa efisiensi finansial tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan dan keberlanjutan sosial. Pendekatan multi-lapisan ini, yang menyeimbangkan efisiensi fiskal dengan ekuitas sosial dan kualitas pendidikan, akan menjadi peta jalan praktis untuk tindakan di masa depan.

## REFERENCES

- Ardiansyah, D. (2019). Efektivitas Regrouping Sekolah Dasar dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 7(1), 123-135.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2024, 20 Februari). Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Berkas rapat.



## Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan,

## Pendidikan dan Informatika (MANEKIN)

Volume 3, No. 04, Juni Tahun 2025

ISSN 2985-4202 (media online)

Hal 301-313

- Hoshizora. (t.t.). Manfaat Kolaborasi Pendidikan. Diakses dari <https://hoshizora.org/blog/manfaat-kolaborasi-pendidikan/>
- Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. (2024, 10 Maret). Pemerintah Pangkas Anggaran, Kualitas Pendidikan Terancam. Siaran Pers.
- Kompas.com. (2023, 15 Juli). Indonesia Masih Kekurangan Ratusan Ribu Guru, Ini Penjelasan Kemendikbudristek. Diakses dari <https://www.kompas.com/edu/read/2023/07/15/140000771/indonesia-masih-kekurangan-ratusan-ribu-guru-ini-penjelasan-kemendikbudristek>
- Mulyasa, E. (2011). Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putri, N. W. (2020). Analisis Dampak Regrouping Sekolah Terhadap Efisiensi Anggaran dan Kualitas Pembelajaran di Kabupaten X [Skripsi, Universitas Y]. Repository Universitas Y.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Efisiensi Anggaran Tetap Menjaga Alokasi 20% Anggaran Pendidikan dalam APBN 2025, accessed June 13, 2025, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/efisiensi-anggaran-tetap-menjaga-alokasi-20-anggaran-pendidikan-dalam-apbn-2025>
- Efisiensi Anggaran Pendidikan Sebuah Keputusan Strategis Presiden Prabowo - Maklumat untuk Umat, accessed June 13, 2025, <https://maklumat.id/efisiensi-anggaran-pendidikan-sebuah-keputusan-strategis-presiden-prabowo/>
- Krisis Kekurangan Guru di Indonesia Fakta, Angka Ideal, dan Upaya Pemerintah, accessed June 13, 2025, <https://mediaindonesia.com/humaniora/720705/krisis-kekurangan-guru-di-indonesia-fakta-angka-ideal-dan-upaya-pemerintah->
- RI Kekurangan 679 Ribu Guru, Kemendikdasmen Dorong Lulusan PPG Mengabdi di Daerah 3T | tempo.co, accessed June 13, 2025, <https://www.tempo.co/politik/ri-kekurangan-679-ribu-guru-kemendikdasmen-dorong-lulusan-ppg-mengabdi-di-daerah-3t-1201413>
- Darurat Pendidikan, Kekurangan Guru Masih Menjadi Masalah, accessed June 13, 2025, <https://www.salamahazzahra.com/berita/read/dunia-pendidikan/1/darurat-pendidikan-kekurangan-guru-masih-menjadi-masalah>
- JPPI Ungkap 5 Dampak Efisiensi Anggaran Pendidikan, Siswa Terancam Putus Sekolah, accessed June 13, 2025, <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-7774928/jppi-ungkap-5-dampak-efisiensi-anggaran-pendidikan-siswa-terancam-putus-sekolah>
- 5 Dampak Pemangkasan Anggaran Pendidikan 2025 Dari Kacamata JPPI - Medcom.id, accessed June 13, 2025, <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/8N0LXOYN-5-dampak-pemangkasan-anggaran-pendidikan-2025-dari-kacamata-jppi>
- The Causes and Impact of Public Elementary School Regrouping, accessed June 13, 2025, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISD/article/download/57063/27536/214365>
- The Education Office's Strategy for Primary School Mergers - Jurnal, accessed June 13, 2025, <https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/jimpi/article/download/1878/903/10332>
- Implementasi Kebijakan Regrouping (Studi Kasus di SD Negeri Banjarsari 1 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro), accessed June 13, 2025, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/article/view/16116/14632>
- DAMPAK REGROUPING SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU SDN MIJEN, JAGALAN, JEBRES, SURAKARTA Oleh: ANIK SULISTYONINGSIH A510140196 PROG, accessed June 13, 2025, <https://eprints.ums.ac.id/64360/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- 50 SD Negeri di Kota Bekasi Akan Dimerger, Disdik Target Rampung Agustus 2025, accessed June 13, 2025, <https://gobekasi.id/2025/05/26/50-sd-negeri-di-kota-bekasi-akan-dimerger-disdik-target-rampung-agustus-2025/>
- Proposal Penggabungan Sekolah | PDF - Scribd, accessed June 13, 2025, <https://id.scribd.com/document/549489672/Proposal-Penggabungan-Sekolah>
- Program Penggabungan Sekolah Dasar (SD) Dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan, accessed June 13, 2025, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1068409&val=12872&title=Program%20Penggabungan%20Sekolah%20Dasar%20SD%20Dalam%20Meningkatkan%20Efektivitas%20dan%20Efisiensi%20Penyelenggaraan%20Pendidikan>
- Manajemen Keuangan Sekolah yang Efektif dan Efisien Beserta Contoh Laporan, accessed June 13, 2025, <https://adminsekolah.net/manajemen-keuangan-sekolah-yang-efektif-dan-efisien-beserta-contoh-laporan/>
- STUDI KELAYAKAN KEBIJAKAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN KERINCI - Jurnal Khazanah Intelektual, accessed June 13, 2025, <https://jurnalkiblatbangdajbi.com/index.php/newkiki/article/download/57/42>
- Analisis Supply And Demand Tenaga Pendidik Pada Satuan Pendidikan Dasar - Jurnal, accessed June 13, 2025, <https://journal.unsika.ac.id/muntazam/article/download/4013/2327/28631>



## Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan,

## Pendidikan dan Informatika (MANEKIN)

Volume 3, No. 04, Juni Tahun 2025

ISSN 2985-4202 (media online)

Hal 301-313

Redistribusi Guru ASN (IS Kom X Jan 3 2025) - DPR RI, accessed June 13, 2025, [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Januari-2025-1953.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Januari-2025-1953.pdf)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REGROUPING DI SD NEGERI CUKILAN 01 KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG - Neliti, accessed June 13, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/472836-none-38f15f19.pdf>

Pentingnya Kolaborasi antara Guru dalam Menerapkan Kurikulum Terpadu, accessed June 13, 2025, <https://pesantrenarafahbitung.com/2025/02/pentingnya-kolaborasi-antara-guru-dalam-menerapkan-kurikulum-terpadu/>

4 Contoh Kegiatan Kolaboratif Guru Penggerak dalam Pendidikan | kumparan.com, accessed June 13, 2025, <https://kumparan.com/ragam-info/4-contoh-kegiatan-kolaboratif-guru-penggerak-dalam-pendidikan-22UjVbgJT8F>

Yuk Kolaborasi Pendidikan! Ini Dia 7 Inisiatif yang Bisa Kita Lakukan, accessed June 13, 2025, <https://hoshizora.org/kolaborasi-pendidikan-inisiatif-yang-bisa-dilakukan/>

Kolaborasi Guru dan Manajemen Sekolah dalam Pengembangan Kurikulum Efektif - Jurnal, accessed June 13, 2025, <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jubima/article/download/3258/2613/11500>

KETERAMPILAN KOLABORASI GURU SEKOLAH DASAR UNTUK KEBERHASILAN PENDIDIKAN INKLUSIF - Lexiroom, accessed June 13, 2025, [http://lexiroom.id/assets/pdf/pendidikan\\_inklusif/2022\\_Jurnal\\_Pengabdian\\_Sinta\\_4.pdf](http://lexiroom.id/assets/pdf/pendidikan_inklusif/2022_Jurnal_Pengabdian_Sinta_4.pdf)

5 Manfaat Kolaborasi Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan, accessed June 13, 2025, <https://hoshizora.org/5-manfaat-kolaborasi-pendidikan-untuk-meningkatkan-mutu-pendidikan/>

PROSES PENGEMBANGAN ORGANISASI KURIKULUM DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA - E-Jurnal UNUJA, accessed June 13, 2025, <https://ejurnal.unuja.ac.id/index.php/pedagogik/article/download/392/287>

PENGEMBANGAN KURIKULUM TERINTEGRASI DI SEKOLAH/MADRASAH - Neliti, accessed June 13, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/321436-pengembangan-kurikulum-terintegrasi-di-s-e7740704.pdf>

(PDF) DAMPAK PERGANTIAN KURIKULUM PENDIDIKAN TERHADAP PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR - ResearchGate, accessed June 13, 2025, [https://www.researchgate.net/publication/373624318\\_DAMPAK\\_PERGANTIAN\\_KURIKULUM\\_PENDIDIKAN\\_TERHADAP\\_PESERTA\\_DIDIK\\_SEKOLAH\\_DASAR](https://www.researchgate.net/publication/373624318_DAMPAK_PERGANTIAN_KURIKULUM_PENDIDIKAN_TERHADAP_PESERTA_DIDIK_SEKOLAH_DASAR)

Siswa Fiktif: Disinyalir Manipulasi Dana Bos - BPK Perwakilan Provinsi SULAWESI TENGAH, accessed June 13, 2025, <https://sulteng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/12/136.-Catatan-Berita-Siswa-Fiktif-Disinyalir-Manipulasi-Dana-Bos-1.pdf>

Reports-Merger.pdf - New York State School Boards Association, accessed June 13, 2025, [https://www.nyssba.org/clientuploads/nyssba\\_pdf/Reports-Merger.pdf](https://www.nyssba.org/clientuploads/nyssba_pdf/Reports-Merger.pdf)